

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH
KAWASAN PERKOTAAN DI SUMATERA SELATAN**



Oleh :

WIJI NURIYAH

(01021282025078)

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan

Disusun Oleh,

Nama : Wiji Nuriyah
NIM : 01021282025078
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING



Tanggal, 06 April 2024

Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH
KAWASAN PERKOTAAN DI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh

Nama : Wiji Nuriyah
NIM : 01021282025078
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 7 Mei 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, Mei 2024

Pembimbing



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Penguji



Dr. Sukanto, S.E. M.Si
NIP. 197403252009121001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 15-5-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiji Nuriyah
NIM : 01021282025078
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan

Pembimbing : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Anggota : Dr. Sukanto, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 07 Mei 2024

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 14 Mei 2024

ASLI
15-5-2024
JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNRI



Membuat Pernyataan

Wiji Nuriyah
NIM. 0102128202578

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Sriwijaya. Pada penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan serta dukungan dari pihak-pihak, terutama Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan tulus membantu serta mendukung penulis dalam setiap proses penulisan.

Dalam skripsi ini, disajikan analisis mengenai belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan yang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Belanja daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman serta tambahan wawasan mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan penerimaan pajak daerah terhadap belanja daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa depan.

Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Indralaya, 03 April 2024



Wiji Nuriyah

NIM. 01021282025078

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai macam hambatan. Namun, setiap hambatan dapat diatasi berkat bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan tulus meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Selain itu, beliau dengan tulus pula memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis.
3. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Yahmin dan Ibu Saniah yang telah memberikan dukungan materil serta moril kepada penulis sehingga penulis sampai pada titik ini. Terima kasih untuk setiap dukungan serta kasih sayang yang diberikan, sehingga penulis dapat mewujudkan keinginan-keinginan termasuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 14 Mei 2024



Wiji Nuriyah

NIM. 01021282025078

ABSTRAK

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Kawasan Perkotaan Di Sumatera Selatan

Oleh :

Wiji Nuriyah ; Anna Yulianita

Belanja daerah merupakan instrumen penting bagi suatu daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah, penunjang kegiatan pemerintahan maupun penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan penerimaan pajak daerah terhadap belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan tahun 2014-2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berupa data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pajak daerah serta belanja daerah dengan satuan miliar rupiah. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *Common Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah kawasan perkotaan (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir) di Sumatera Selatan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan tahun 2014-2023.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Pajak Daerah, dan Belanja Daerah

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis., S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Ketua



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

ABSTRACT

The Effect Of General Allocation Funds, Special Allocation Funds And Regional Tax Revenue On Regional Expenditure In Urban Areas In South Sumatera

By :

Wiji Nuriyah ; Anna Yulianita

Regional expenditure is an important instrument for a region. Regional expenditure is used to finance regional needs in the context of regional development, supporting government activities and providing public facilities for the community. This research aims to analyze the influence of General Allocation Funds, Special Allocation Funds and regional tax revenues on regional expenditure in urban areas in South Sumatera in 2014-2023. The data used is secondary data sourced from the website of the Directorate General of Financial Balance, in the form of data on General Allocation Funds, Special Allocation Funds, regional taxes and regional expenditure in billions of rupiah. The analysis technique used is panel data regression with the Common Effect model. The research results show that General Allocation Funds and regional tax revenues have a significant positive effect on regional expenditure in urban areas (Palembang City, Banyuasin Regency, Ogan Ilir Regency and Ogan Komering Ilir Regency) in South Sumatera. Meanwhile, the Special Allocation Fund does not have a significant effect on regional expenditure in urban areas in South Sumatera in 2014-2023.

Keywords : General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Tax Revenue and Regional Expenditure

Acknowledge by,
Head of Development Economics Department



Dr. Mukhlis., S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Chairman



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Wiji Nuriyah
	NIM	01021282025078
	Tempat, Tanggal Lahir	Banyuasin, 02 Februari 2002
	Alamat	Desa Saleh Mulya, Kec. Air Salek, Kab. Banyuasin
	No. HP	085156117469
AGAMA	Islam	
JENIS KELAMIN	Perempuan	
STATUS KEWARGANEGARAAN	Warga Negara Indonesia	
TINGGI BADAN	153	
BERAT BADAN	41	
EMAIL	wijinuriyah26@gmail.com	
PENDIDIKAN		
2007-2008	TK Karya Ibu	
2008-2014	SD Negeri 10 Air Saleh	
2014-2017	SMP Negeri 2 Air Saleh	
2017-2020	SMA Negeri 1 Air Saleh	
2020-2024	S-1 Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN ORGANISASI		
<ul style="list-style-type: none">• Staff Ahli Divisi Dana dan Usaha IMEPA FE UNSRI		

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.2 Konsep Desentralisasi Fiskal	21
2.1.3 Konsep Otonomi Daerah	21
2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU).....	22
2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)	24
2.1.6 Penerimaan Pajak Daerah	25
2.1.7 Belanja Daerah.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Pikir.....	31
2.4 Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	34
3.2 Data dan Pengumpulan Data	34
3.3 Teknik Analisis.....	34
3.4 Pemilihan Estimasi Model.....	35

3.4.1 <i>Common Effect Model</i> (CEM)	35
3.4.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	36
3.4.3 <i>Random Effect Model</i> (REM)	36
3.5 Pemilihan Estimasi Model.....	36
3.5.1 Uji Chow	37
3.5.2 Uji Hausman	37
3.5.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM).....	38
3.6 Uji Asumsi Klasik	38
3.6.1 Uji Multikolinieritas	38
3.6.2 Uji Heteroskedastisitas	39
3.6.3 Uji Autokorelasi.....	39
3.7 Uji Statistik.....	39
3.7.1 Uji t Statistik	39
3.7.2 Uji F Statistik.....	40
3.8 Koefisien Determinasi (R^2)	40
3.9 Definisi Operasional Variabel	41
3.9.1 Variabel Terikat	41
3.9.2 Variabel Bebas	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan	43
4.1.2 Pemerintah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan.....	45
4.1.3 Pertumbuhan Belanja Daerah	47
4.1.4 Pertumbuhan Dana Alokasi Umum	50
4.1.5 Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus	51
4.1.6 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah.....	52
4.2 Hasil Estimasi.....	53
4.2.1 Pemilihan Estimasi Model	55
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.2.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	59
4.2.4 Uji Statistik	60
4.2.5 Koefisien Determinasi (R^2).....	62

4.3 Pembahasan	63
4.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah	63
4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah.....	64
4.3.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah	65
4.3.4 Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah	66
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Belanja Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2014 2023 (Miliar Rupiah).....	7
Tabel 1.2 Pendapatan Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah).....	8
Tabel 1.3 Dana Alokasi Umum Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah).....	11
Tabel 1.4 Dana Alokasi Khusus Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah).....	12
Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)	14
Tabel 4.1 Pembagian Daerah Administrasi Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2022	54
Tabel 4.2 Rata-rata Belanja Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)	55
Tabel 4.3 Kontribusi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)	56
Tabel 4.4 Rata-rata Dana Alokasi Umum Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)	58
Tabel 4.5 Rata-rata Dana Alokasi Khusus Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)	59
Tabel 4.6 Rata-rata Penerimaan Pajak Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)	60
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Data Panel Menggunakan Metode <i>Common Effect</i> <i>Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> dan <i>Random Effect Model</i>	61
Tabel 4.8 Hasil Pemilihan Model Menggunakan Uji Chow	62

Tabel 4.9 Hasil Pemilihan Model Menggunakan Uji Hausman	63
Tabel 4.10 Pemilihan Model Menggunakan Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	64
Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas.....	65
Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas.....	65
Tabel 4.13 Hasil Estimasi Regresi Data Panel Menggunakan CEM	66
Tabel 4.14 Hasil Uji t Statistik.....	68
Tabel 4.15 Hasil Uji F Statistik.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	19
Gambar 2.2 : Kerangka Pikir Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Regresi	81
Lampiran 2. Uji Chow.....	82
Lampiran 3. Uji Hausman.....	82
Lampiran 4. Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	82
Lampiran 5. Uji Multikolinieritas	83
Lampiran 6. Uji Heteroskedastisitas	83
Lampiran 7. Uji Regresi Model CEM.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara penganut asas desentralisasi dari pusat ke daerah, yang berupa penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberi hak kepada pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus daerahnya. Hak dan wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat pada daerah dalam mengatur sendiri daerahnya disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah daerah, karena adanya otonomi daerah maka daerah tersebut dituntut agar menunjukkan kemandiriannya. Keberhasilan suatu otonomi daerah tentunya perlu diarahkan pada pendanaan yang layak melalui dana perimbangan antara pusat dan juga daerah. Desentralisasi yakni alat kebijakan dari pemerintah yang dianggap efektif dalam mengatasi masalah terkait stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di negara demokrasi (Inayati & Setiawan, 2018). Desentralisasi ini tidak sekedar pelimpahan hak dan wewenang, namun desentralisasi juga diharapkan mampu memberi manfaat dalam hal meningkatkan partisipasi dan perbaikan alokasi sumber daya yang produktif.

Wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tidak serta merta membuat daerah tersebut menggunakan sumber daya ekonomi sesukanya. Demi menjamin terselenggaranya konsep otonomi, maka pemerintah serta pemerintahan daerah menganut konsep *good governance* untuk mencapai tujuan. *Good governance* ini diartikan sebagai proses dalam pencapaian keputusan serta

pelaksanaan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan bersama. Jika mengutip dari *World Bank*, *good governance* yakni penyelenggaraan manajemen yang kompak juga bertanggung jawab seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi serta pasar efisien, mencegah kekeliruan alokasi dana untuk investasi, mencegah adanya korupsi, dan menjalankan disiplin anggaran (Arioyuda & Nugroho, 2020).

Otonomi daerah merupakan bentuk dari pelimpahan wewenang dan juga tanggung jawab kepada pemerintah di daerah oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah mempunyai hak mengatur serta mengurus sendiri daerahnya baik pada sektor keuangan ataupun non keuangan. Pemerintah daerah harus bisa mengelola keuangan daerahnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Penyusunan APBN dimulai dari kesepakatan yang terjadi antara pemerintah daerah dan juga DPRD mengenai kebijakan umum pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD.

Pelaksanaan yang nyata serta bertanggung jawab dari otonomi daerah yakni pelaksanaan dari fungsi-fungsi pemerintah pusat yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang sejalan dengan fungsi-fungsi yang dilimpahkan, atau lebih ringkasnya fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi yang dilimpahkan. Pemerintah daerah diberi hak pada bidang keuangan yang akan diperoleh sebagai bentuk penerimaan keuangan daerah, pemerintah nantinya diberi kebebasan dan secara langsung dapat mengelola juga memanfaatkan sumber-sumber keuangan daerah.

Sehubungan dengan otonomi daerah, efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah perlu peningkatan dengan lebih mengamati aspek-aspek hubungan yang ada pada susunan pemerintahan daerah, potensi serta keberagaman, peluang, tantangan serta persaingan global melalui pemberian wewenang seluas-luasnya pada daerah diiringi oleh pemberian hak dan kewenangan dalam penyelegaraan otonomi daerah di kesatuan pelaksanaan pemerintahan negara.

Permasalahan yang seringkali dihadapi pemerintah daerah yakni tentang alokasi anggaran. Alokasi anggaran yaitu jumlah anggaran untuk masing-masing agenda yang akan dilaksanakan. Dengan terbatasnya sumber daya, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan pendapatan untuk belanja daerah yang sifatnya produktif (Simanjuntak & Ginting, 2019). Belanja daerah adalah perkiraan beban yang harus dikeluarkan daerah, pengalokasiannya harus merata supaya bisa dinikmati keseluruhan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, terutama untuk hal pelayanan umum.

Pemerintah daerah telah mengalokasikan sebagian besar pendapatan daerahnya untuk operasional dibandingkan belanja modal. pengeluaran operasi termasuk hibah, bunga, pegawai, barang dan jasa serta subsidi. Mengalokasikan dana untuk belanja modal sangat membantu dalam memberikan layanan publik jika mempertimbangkan manfaatnya. Meningkatkan kualitas layanan publik dapat dimulai dari memperbaiki manajemen, yakni dengan meminimalkan kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan dari konsumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan jika belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih untuk periode anggaran tertentu (BPK, 2022). Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan jika sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus. Selain itu, sumber pendapatan daerah juga berasal dari pendapatan lain-lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah adalah seluruh jumlah yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah, yang dipotong dari ekuitas dana berjalan dan merupakan tanggung jawab daerah untuk satu tahun anggaran yang tidak mendapat penggantian dari daerah (BPK, 2022). Belanja daerah ini terbagi menjadi empat jenis, yang pertama yakni belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja untuk barang dan jasa, belanja hibah, belanja subsidi, dan juga belanja bantuan sosial. Selain itu, kategori pengeluaran kedua adalah belanja modal, yang mencakup investasi pada tanah, mesin dan peralatan, bangunan/gedung, sistem irigasi, jalan dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Belanja tak terduga merupakan kategori belanja ketiga, dan belanja transfer, yang mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, merupakan kategori terakhir.

Belanja daerah merupakan instrumen penting bagi suatu daerah. Segala operasional pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota didanai melalui belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah (meliputi

pembangunan serta perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi), penunjang kegiatan pemerintahan maupun penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat. Fasilitas publik dirancang oleh pemerintah untuk membuat hidup lebih mudah bagi masyarakat umum. Dalam masyarakat, fasilitas publik seringkali disebut dengan fasilitas sosial atau fasilitas umum. Besaran dana yang dialokasikan di daerah tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan prasarana dan sarana. Sebagai bagian dari perencanaan keuangan, pembiayaan penyediaan fasilitas umum ditanggung dalam APBD. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan yang optimal, belanja daerah perlu diawasi secara ketat. Selain itu, belanja daerah juga tentunya harus dialokasikan secara adil dan merata, agar semua kelompok masyarakat dapat menikmati tanpa adanya diskriminasi.

Pemerintah Sumatera Selatan menentukan capaian kinerja belanja baik pada konteks daerah, satuan kerja perangkatnya, ataupun program yang tujuannya meningkatkan tanggung jawab perencanaan serta memperjelas efektivitas dan juga efisiensi dalam menggunakan anggaran. Belanja yang paling banyak menguras anggaran di setiap daerah yakni belanja pegawai, bukan hanya untuk satu tahun, namun di setiap tahun anggaran belanja pegawai selalu menjadi jenis belanja dengan anggaran dan realisasi terbesar. Besaran realisasi belanja daerah di Sumatera selatan cenderung fluktuasi atau terjadi perubahan pada besaran realisasi belanjanya pada setiap tahun anggaran.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan perkotaan, terdiri dari Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kawasan tersebut merupakan wilayah metropolitan dan merupakan

program strategis pemerintah pusat yang tertuang dalam rencana jangka panjang menengah nasional. Kawasan ini sering disebut Patungraya Agung yang berarti Palembang, Betung, Indralaya dan Kayu Agung.

Kawasan perkotaan Patungraya Agung menjadi salah satu prioritas kawasan strategis nasional sebagai alat pertumbuhan wilayah di Sumatera, kawasan ini diarahkan untuk pusat kegiatan nasional sebagai *outlet* pemasaran wilayah Sumatera Selatan dengan tetap memperkuat fungsi konektivitas dengan pusat pertumbuhan regional internasional serta alat pusat pelaksanaan berskala internasional. Kawasan ini juga menjadi pusat perdagangan dan jasa, produksi serta distribusi, dan juga perluasan kegiatan industri serta pertanian hilir dengan tetap memperkuat fungsi konektivitas menuju pusat kegiatan global (BPIW, 2017).

Pada kawasan tersebut, pemenuhan kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah didanai melalui belanja daerah. Berikut data realisasi belanja daerah kawasan perkotaan metropolitan di Sumatera Selatan:

**Tabel 1.1 Belanja Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan
Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)**

Belanja Daerah (Miliar Rupiah)				
Tahun	Palembang	Banyuasin	Ogan Ilir	Ogan Komering Ilir
2014	3.144,91	1.751,62	1.224,07	1.682,77
2015	3.182,26	1.658,70	1.281,09	1.882,00
2016	2.133,78	1.841,97	1.102,97	1.979,33
2017	3.141,85	1.965,75	1.355,05	2.108,84
2018	3.488,24	1.992,04	1.374,23	1.918,48
2019	3.968,21	2.424,70	1.573,96	2.369,15
2020	3.688,14	2.550,70	1.588,54	2.489,89
2021	3.547,20	2.332,84	1.451,19	2.367,34
2022	4.009,81	2.266,67	1.573,45	2.364,13
2023	2.691,79	2.076,19	1.057,55	1.984,58

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah tahun 2024

Tabel 1.1 menunjukkan data realisasi belanja daerah di kawasan perkotaan Sumatera Selatan meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Belanja daerah di kawasan tersebut besaran realisasinya cenderung fluktuasi. Kota Palembang selama 2014 hingga 2023 realisasi terbesar pada tahun 2023 sebesar 4.009,81 miliar rupiah, sementara realisasi terkecil tahun 2016 sebesar 2.133,78 miliar rupiah. Realisasi belanja daerah terkecil Kabupaten Banyuasin yakni pada tahun 2015 sebesar 1.658,70 miliar rupiah dan realisasi belanja terbesarnya pada tahun 2020 sebesar 2.550,70 miliar rupiah. Kabupaten Ogan ilir besaran realisasi belanja selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Realisasi terendah pada belanja daerah Ogan Ilir selama 10 tahun terakhir yakni tahun 2023 sebesar 1.057,55 miliar rupiah, sedangkan realisasi belanja tertinggi tahun 2020 sebesar 1.588,54 miliar rupiah. Sementara itu, Kabupaten Ogan Komering Ilir realisasi

belanja daerah terbesar yakni pada tahun 2020 sebesar 2.489,89 miliar rupiah dan realisasi belanja terkecil pada tahun 2014 sebesar 1.682,77 miliar rupiah.

**Tabel 1.2 Pendapatan Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan
Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)**

Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)				
Tahun	Palembang	Banyuasin	Ogan Ilir	Ogan Komering Ilir
2014	2.945,00	1.833,03	1.071,16	1.462,99
2015	3.015,71	1.650,49	1.235,37	1.736,68
2016	3.122,90	1.951,23	1.243,19	1.979,25
2017	3.417,59	2.006,42	1.363,22	2.120,35
2018	3.485,88	2.080,65	1.417,19	2.224,00
2019	3.987,55	2.449,78	1.631,00	2.471,79
2020	3.695,47	2.224,01	1.509,20	2.243,10
2021	3.690,8	2.285,92	1.546,81	2.230,24
2022	4.067,46	2.354,40	1.633,49	2.399,95
2023	2.530,24	2.262,60	1.273,99	1.929,85

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data tahun 2024

Belanja daerah dalam pelaksanaannya didanai oleh pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir selama tahun 2014 hingga 2023 cenderung fluktuasi. Terjadi peningkatan pendapatan cukup besar dan secara bersamaan dari ke-4 kawasan tersebut pada tahun 2019 dan 2022. Dilihat dari sisi pendapatan daerah, kesiapan anggaran guna belanja daerah dari kawasan tersebut masih kurang karena masih sering terjadi defisit APBD. Defisit APBD yakni kondisi di mana belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerahnya.

Kota Palembang selama 10 tahun terakhir terjadi defisit APBD pada tahun 2014, 2015, 2018 dan 2023. Tahun 2014, defisit APBD Kota Palembang sebesar 199,97 miliar rupiah. Tahun 2015, dengan total pendapatan sebesar 3.015,71,

terjadi defisit APBD sebesar 166,26 miliar rupiah. Tahun 2018 total realisasi belanja sebesar 3.488,24 miliar rupiah, sementara pendapatan daerahnya sebesar 3.485,88 miliar rupiah. Pada tahun 2023, total realisasi belanja daerah Kota Palembang sebesar 2.691,79 miliar rupiah dengan total pendapatan daerah sebesar 2.530,24 miliar rupiah.

Defisit APBD Kabupaten Banyuasin terjadi ada tahun 2015, 2020 dan 2021. Pada tahun 2015, terjadi defisit APBD Kabupaten Banyuasin sebesar 8,21 miliar rupiah. Tahun 2020 total pendapatan sebesar 2.224,01 miliar rupiah dan realisasi belanja daerah sebesar 2.550,70 miliar rupiah, sehingga defisit APBD Kabupaten Banyuasin tahun 2020 sebesar 326,69 miliar rupiah. Tahun 2021 Kabupaten Banyuasin juga mengalami defisit APBD, dengan realisasi belanja daerah sebesar 2.332,84 miliar rupiah dan total pendapatan daerah sebesar 2.285,92 miliar rupiah. Sehingga defisit APBD pada tahun 2021 sebesar 46,92 miliar rupiah.

Kabupaten Ogan Ilir selama tahun 2014 hingga 2023 mengalami 3 kali defisit APBD yakni pada tahun 2014, 2015 dan 2020. Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2014 sebesar 1.071,16 miliar rupiah dengan realisasi belanja sebesar 1.224,07 miliar rupiah, sehingga terjadi defisit APBD sebesar 152,91 miliar rupiah. Tahun 2015, defisit APBD sebesar 45,72 miliar rupiah. Defisit APBD Ogan Ilir pada tahun 2020 sebesar 79,34 miliar rupiah dengan total pendapatan sebesar 1.509,20 miliar rupiah dan realisasi belanja daerah sebesar 1.588,54 miliar rupiah.

Defisit APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 10 tahun terakhir terjadi sebanyak 6 kali yakni tahun 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 dan 2023. Pada tahun

2014, defisit yang terjadi sebesar 219,78 miliar rupiah, 2015 sebesar 145,32 miliar rupiah dan tahun 2016 sebesar 0,08 miliar rupiah. Kemudian tahun 2020 dengan realisasi belanja sebesar 2.489,89 miliar rupiah dan total pendapatan daerah sebesar 2.243,10 miliar rupiah. Pada tahun 2021 dengan total pendapatan daerah sebesar 2.230,24 miliar rupiah, sementara realisasi belanja sebesar 2.367,34 miliar rupiah. Kemudian, defisit APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir selanjutnya terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi belanja sebesar 1.984,58 miliar rupiah dan total pendapatan daerah sebesar 1.929,85 miliar rupiah.

Pada sistem desentralisasi, selain dana yang sumbernya dari daerah itu sendiri, terdapat juga Dana Alokasi Umum yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Dalam pembiayaan kebutuhan pada pelaksanaan desentralisasi, Dana Alokasi Umum (DAU) yang asalnya dari APBN dialokasikan untuk mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU diperuntukkan menutup celah akibat kebutuhan daerah lebih dari penerimaannya. Pemerintah daerah dapat dengan leluasa mengatur kemana arah penggunaan dana ini, apakah untuk memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat atau digunakan untuk kebutuhan daerah yang lainnya.

**Tabel 1.3 Dana Alokasi Umum Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan
Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)**

Dana Alokasi Umum (Miliar Rupiah)				
Tahun	Palembang	Banyuasin	Ogan Ilir	Ogan Komering Ilir
2014	1.203,66	824,21	561,37	931,15
2015	1.210,60	829,43	557,40	958,99
2016	1.292,12	930,55	623,84	1.049,99
2017	1.269,43	923,77	619,87	1.042,87
2018	1.269,43	933,63	623,35	1.053,84
2019	1.357,51	979,54	649,59	1.085,60
2020	1.226,62	878,50	588,77	969,64
2021	1.207,73	873,99	579,57	966,48
2022	1.207,73	876,01	579,57	967,66
2023	1.298,20	936,20	599,85	1.019,41

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah tahun 2024

Tabel 1.3 menunjukkan penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014 hingga tahun 2023. Besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima kawasan perkotaan tersebut mengalami fluktuasi. Dana Alokasi Umum yang diterima jumlahnya cenderung lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah itu sendiri. Kota Palembang menjadi daerah dengan penerimaan Dana Alokasi Umum terbesar berdasarkan data pada Tabel 1.2. Dana Alokasi Umum tertinggi Kota Palembang yakni pada tahun 2019 sebesar 1.357,51 miliar rupiah. Dalam kaitannya dengan belanja daerah, Dana Alokasi Umum yang dialokasikan ke tiap-tiap kabupaten/kota alangkah baiknya digunakan untuk investasi yang efektif dalam pembiayaan belanja daerah hingga dapat merangsang potensi penerimaan baru yang nantinya akan menjadi sumber penerimaan daerah serta dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian.

Dalam membiayai kebutuhan daerah melalui belanja daerah, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana yang bersumber dari APBN, dialokasikan untuk mendanai kegiatan pemerintahan yang menjadi prioritas nasional. Setiap transfer Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah akan dialokasikan untuk belanja pemerintah daerah, sehingga apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis agar transfer Dana Alokasi Khusus yang diterima lebih besar (Nailufar & Sufitrayati, 2019).

**Tabel 1.4 Dana Alokasi Khusus Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan
Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)**

Dana Alokasi Khusus (Miliar Rupiah)				
Tahun	Palembang	Banyuasin	Ogan Ilir	Ogan Komering Ilir
2014	66,05	112,26	74,13	88,87
2015	199,75	90,22	23,79	137,99
2016	429,36	399,29	159,13	347,44
2017	431,29	292,16	236,84	306,00
2018	481,90	319,25	239,90	369,72
2019	401,55	369,12	280,51	346,07
2020	458,03	341,49	247,01	256,69
2021	394,03	354,89	258,61	309,62
2022	498,37	467,15	295,89	392,33
2023	531,31	461,82	301,34	459,64

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah tahun 2024

Tabel 1.4 menunjukkan penerimaan Dana Alokasi Khusus di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tahun 2014 dan 2015, penerimaan Dana Alokasi Khusus masih sangat kecil dibandingkan tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan Tabel 1.4, selama tahun 2015 hingga 2023, Kota Palembang menjadi daerah dengan penerimaan Dana Alokasi

Khusus tertinggi dibandingkan 3 daerah lainnya. Penerimaan Dana Alokasi Khusus tertinggi Kota Palembang yakni pada tahun 2023 sebesar 531,31 miliar rupiah. Kabupaten Banyuasin memperoleh Dana Alokasi Khusus tertinggi pada tahun 2022 sebesar 467,15 miliar rupiah. Perolehan tertinggi Kabupaten Ogan Ilir yakni pada tahun 2023 sebesar 301,34 miliar rupiah. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir memperoleh Dana Alokasi Khusus tertinggi pada tahun 2023 sebesar 459,64 miliar rupiah.

Pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan daerahnya tidak hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat, namun terdapat pula dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi, kekayaan lain yang dipisahkan dan lain-lain. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk belanja daerah. Pajak masih menjadi sumber penerimaan terbesar baik untuk suatu negara maupun suatu daerah. Tingginya penerimaan pajak maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola sumber penerimaan daerah dan mengalokasikannya untuk belanja daerah. berikut data penerimaan pajak daerah di kawasan perkotaan Sumatera Selatan:

Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Daerah Kawasan Perkotaan di Sumatera Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)

Penerimaan Pajak Daerah (Miliar Rupiah)				
Tahun	Palembang	Banyuasin	Ogan Ilir	Ogan Komering Ilir
2014	395,88	24,37	10,55	72,49
2015	472,03	34,35	97,42	30,74
2016	536,55	56,84	62,84	21,85
2017	680,01	72,51	15,77	37,27
2018	721,01	82,35	19,46	45,69
2019	832,06	127,73	40,82	62,97
2020	787,92	123,98	51,03	60,07
2021	838,14	139,36	58,83	65,78
2022	1.172,72	158,83	75,99	86,16
2023	685,26	163,53	45,04	52,24

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.5, data menunjukkan jika terdapat perbedaan penerimaan pajak yang diperoleh Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kota Palembang menjadi daerah dengan penerimaan pajak daerah terbesar. Penerimaan pajak daerah di Kota Palembang hampir meningkat setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020 yang terjadi penurunan sekitar 44,14 miliar rupiah. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuasin juga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 3,75 miliar rupiah. Kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan yang cukup besar pada penerimaan pajak daerahnya, yakni pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar 30,95 miliar rupiah. Sementara itu, Kabupaten Ogan Komering Ilir penerimaan pajak daerahnya mengalami fluktuasi. Penerimaan terbesar selama tahun 2014 hingga 2023 yakni pada tahun 2022 sebesar 86,16 miliar rupiah, dan penerimaan terendah pada tahun 2016 sebesar 21,85 miliar rupiah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akan diteliti sejauh mana pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, penerimaan pajak daerah dan juga Retribusi terhadap belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan, meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan komering Ilir. Analisa akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Kawasan Perkotaan Di Sumatera Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan penerimaan pajak daerah terhadap belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan tahun 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan penerimaan pajak daerah terhadap belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan tahun 2014-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis dan juga pihak-pihak terkait. Manfaat yang akan diperoleh diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat menjadi landasan serta tambahan informasi bagi para peneliti yang mengambil topik serupa

mengenai Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, penerimaan pajak daerah dan belanja daerah kawasan perkotaan di Sumatera Selatan tahun 2014-2023.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Sedangkan manfaat praktis bagi peneliti yakni menambah pengalaman dan wawasan tentang topik terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). *The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province*. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 6(5), 26–30. www.ijsrp.org
- Alamsyah, I. F., Esra, R., Awalia, S., & Nohe, D. A. (2020). Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Timur. *Ideas Publishing*, 1–95.
- Amalia, F. (2017). *Flypaper Effect of Regional Expenditure and It's Impact to Regional Inequality in Indonesia*. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 125–138. <https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.3293>
- Arioyuda, F., & Nugroho, S. B. M. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Tahun 2013-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 9, 132–141.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31498%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/download/31498/25648>
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis Of Panel Data (Springer Texts In Business And Economics) - Sixth Edition*. In Springer.
- BAPENDA. (2023). *Apa itu retribusi?* Retrieved from BAPENDA Madiun: <https://bapenda.madiunkota.go.id/2023/10/11/apa-itu-retribusi-daerah/#:~:text=BAPENDA%20%E2%80%93%20Retribusi%20daerah%20adalah%20pungutan,kepentingan%20orang%20pribadi%20atau%20badan.>
- BAPPEDA. (2023, Desember 21). *Dana Alokasi Khusus*. Retrieved from BAPPEDA Bantul: <https://bappeda.bantulkab.go.id/index.php/informasi/dana-alokasi-khusus>
- Boediono. (1999). *Teori Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomika & Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta:LPFE.
- BPIW. (2017). *Kinerja Laporan*. Retrieved from <https://bpiw.pu.go.id>
- BPK. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved from PP No. 12 Tahun 2019: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019#:~:text=PP%20ini%20mengatur%20mengenai%20lingkup,yang%20di%20kuasai%20oleh%20pemerintah%20daerah.>
- BPK. (2020). *Pedoman Teknis Keuangan Daerah*.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>.
- BPK. (2022). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Retrieved from UU No. 1 Tahun 2022:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-n0--tahun-2022>
- BPK. (2020). *Pedoman Teknis Keuangan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>.
- BPKAD. (2023). *Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Dalam APBD Tahun Anggaran 2023*. <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/kebijakan-penyaluran-dana-alokasi-umum-dalam-apbd-tahun-anggaran-2023>.
- BPS. (2023). *Kependudukan*.
<https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab1>.
- BPS. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto*.
<https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--pengeluaran-.html>
- BPS. (2024). Retrieved from BPS Kota Palembang:
<https://palembangkota.bps.go.id/>
- BPS. (2024). Retrieved from BPS Kabupaten Banyuasin:
<https://banyuasinkab.bps.go.id/>
- BPS. (2024). Retrieved from BPS Ogan Ilir: <https://oganalirkab.bps.go.id/>
- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya*, 5(2), 2750–2761. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.896>
- Dana, P., Umum, A., Dan, D. A. U., Asli, P., Terhadap, P. A. D., Daerah, B., Kabupaten, P., & Di, K. (2014). *Surya Hamdani, 2014. 1936*.
- Dumairy. (1999). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga Indonesia.
- Febriani, V. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit-Undip.
- Gujarati, P. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba.

- Harjiyanti, N. (2015). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah D.I. Yogyakarta. *Ekonomi*, 1–9.
- Inayati, N. I., & Setiawan, D. (2018). Fenomena *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(2), 220–239. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.2062>
- Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu--tahun-2022>
- Kaluara, D. R., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. . (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Sulawesi Utara (2010-2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3), 74–85.
- Nailufar, F., & Sufitrayati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*.
- Nur, E., Astutik, P., & Kuntara, A. D. (2017). Nur, Astutik, dan Kuntara. (2017). *Flypaper Effect and Factors Affecting Regional Government ' s Expenditure at Districts of Yogyakarta Special Region Province 2008 - 2014*. Foura.Org, 2017. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta. *Foura.Org, Maimunah 2006*.
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. *Assets*, 5(1), 78–88.
- Nurhasanah, N., Thoyib, M., & Agustina, S. A. (2022). *The Factors Affecting Regional Expenditures on Regency/Municipality in South Sumatera Province. Proceedings of the 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)*, 641, 101–104. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220202.017>
- Nurwahyu, Ferilanto Putro Dwi, Badjuri, & Moh.adenan. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (Jek)*, 3(1), 26. <https://core.ac.uk/download/pdf/296469733.pdf>
- Prishardoyo, B. (2008). Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Broto (PDDDB) Kabupaten Pati Tahun 2000 - 2005. *Jejak*, 1(1), 1–90.
- Putrisandya, A. A., & Dewi, M. H. U. (2019). ISSN : 2303-017 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, PDRB Terhadap Belanja

- Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 10(11), 4717–4744.
- Rahula, S. A., & Bowo, P. A. (2021). *The Effect of General Allocation Funds and Local Own-Revenue on Regional Government Expenditure in Central Java Province. Indicators : Journal of Economic and Business*, 2(1), 257–266. <https://doi.org/10.47729/indicators.v2i1.63>
- Ridwan. (2021). *Buku Ekonomi Publik*. Gowa: Pustaka Pelajar.
- Rohima, S. (2020). *Ekonomi Publik*. Palembang: UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Simanjuntak, L. L. F., Ahmad, S., Ika, S. F., & Hasni, Y. (2013). *Analysis of Flypaper Effect in General Allocation Fund and Regional Original Income To Regional Expenditure. The 14th FourA Annual Conference 2013, Penang, Malaysia*, 1–29.
- Tahir, R., Koleangan, R. A. ., & Sumual, J. I. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *16(03)*, 1–11.
- Widarjono, A. (2005:356). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yulianita, A., & Marissa, F. (2020). *Penerapan Aplikasi Software Pada Penelitian Ilmiah* (p. 34). Palembang: UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Yuwana, S. I. P., & Siddiq, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 448–454.